



LAPORAN PENERAPAN SPM

TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa Daerah berkewajiban menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menyampaikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran tersebut berakhir kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 ini tersusun atas kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan SPM ini. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Sintang, Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sintang



dr. HARYSINTO LINOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710722 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum	3
D. Arah Kebijakan	3
Bab II. Penerapan SPM	4
A. Pengumpulan Data	4
B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	6
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	8
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	10
Bab III. Pencapaian SPM	11
A. Jenis Pelayanan Dasar	11
B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	11
C. Anggaran	13
D. Dukungan Personil	14
E. Hasil Capaian	14
F. Kendala, Permasalahan dan Solusi	16
Bab IV. Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	17
Bab V. Penutup	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. MAKSUD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Sintang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

- a. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

- b. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

2. TUJUAN

Penerapan SPM ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam Penerapan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Sintang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. KEBIJAKAN UMUM

Visi Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”. Kemudian misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode 2021-2026. Adapun misi pembangunan yaitu:

Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.

- Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
- Misi 3 : Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari
- Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan terdapat pada Misi 2 RPJMD periode 2021-2026.

D. ARAH KEBIJAKAN

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sintang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kab. Sintang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
2. SPM sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sehingga dalam implementasinya harus termuat dalam rumusan program pembangunan RPJMD Kab. Sintang tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mewujudkan Kab. Sintang yang sehat.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. PENGUMPULAN DATA

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA SINTANG

TARGET PENERIMA PELAYANAN														
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDI KAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Serawai	Serawai	518	494	298	2271	2621	7504	2156	4284	7	24		
2	Ambalau	Kemangai	305	291	292	1338	1544	4421	1270	2512	10	31		
3	Kayan Hulu	Tebidab	519	496	326	2279	2629	7531	2163	4299	1	123		
4	Sepauk	Sepauk	1109	1059	883	4869	5617	16086	4621	9218	40	33		
5	Tempunak	Tempunak	401	382	320	1758	2029	12785	1669	3309	12	22		
		Jelimpau	239	229	152	1051	1212	3470	997	1964	7	15		
6	Sei Tebelian	Pandan	694	662	553	3046	3514	10063	2891	5756	30	45		
7	Sintang	Sungai Durian	582	556	553	2555	2948	8443	2425	4822	54	31		
		Tanjung Puri	640	611	609	2808	3240	20621	2665	5305	46	36		
		Dara Juanti	223	213	204	977	1127	3228	928	1825	23	25		
8	Dedai	Dedai	421	402	296	1848	2132	6105	1754	3479	0	53	4903	9884
		Emparu	235	224	187	1032	1190	5701	979	1929	150	20		
9	Kayan Hilir	Nanga Mau	580	554	413	2547	2940	8416	2418	4808	43	59		
10	Kelam Permai	Kebong	280	267	256	1228	1417	8988	1166	2301	49	20		
		Nanga Lebang	83	80	77	366	423	12091	347	663	5	9		
11	Binjai Hulu	Mensiku	271	259	238	1190	1374	3932	1130	2230	31	19		
12	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	265	253	213	1164	1343	3844	1105	2180	7	26		
		Serangas	225	214	158	985	1137	3255	935	1841	2	12		
13	Ketungau Tengah	Merakai	655	625	459	2875	3315	9498	2728	5429	0	36		
14	Ketungau Hulu	Senaning	471	450	404	2067	2386	6830	1962	3896	12	6		
	Jumlah		8716	8320	6891	38254	44138	162812	36308	72050	529	645	4903	9884

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2022

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA SINTANG

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	SERAWAI	Puskesmas: 1 Pustu: 5 Poskesdes: 18	Puskesmas: 1 Pustu: 5 Poskesdes: 18	Dokter : 4 Perawat : 37 Bidan : 16	Dokter : 4 Perawat : 37 Bidan : 16
2	AMBALAU	Puskesmas: 1 Pustu: 11 Poskesdes: 4	Puskesmas: 1 Pustu: 11 Poskesdes: 4	Dokter : 2 Perawat : 15 Bidan : 19	Dokter : 2 Perawat : 15 Bidan : 19
3	KAYAN HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 16	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 16	Dokter : 1 Perawat : 35 Bidan : 26	Dokter : 1 Perawat : 35 Bidan : 26
4	SEPAUK	Puskesmas: 1 Pustu: 14 Poskesdes: 9	Puskesmas: 1 Pustu: 14 Poskesdes: 9	Dokter : 3 Perawat : 54 Bidan : 63	Dokter : 3 Perawat : 54 Bidan : 63
5	TEMPUNAK	Puskesmas: 2 Pustu: 5 Poskesdes: 9	Puskesmas: 2 Pustu: 5 Poskesdes: 9	Dokter : 4 Perawat : 50 Bidan : 44	Dokter : 4 Perawat : 50 Bidan : 44
6	SEL. TEBELIAN	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Dokter : 3 Perawat : 37 Bidan : 25	Dokter : 3 Perawat : 37 Bidan : 25
7	SINTANG	Puskesmas: 3 Pustu: 1 Poskesdes: 6	Puskesmas: 3 Pustu: 1 Poskesdes: 6	Dokter : 16 Perawat : 84 Bidan : 55	Dokter : 16 Perawat : 84 Bidan : 55
8	DEDAI	Puskesmas: 2 Pustu: 7 Poskesdes: 11	Puskesmas: 2 Pustu: 7 Poskesdes: 11	Dokter : 4 Perawat : 65 Bidan : 46	Dokter : 4 Perawat : 65 Bidan : 46
9	KAYAN HILIR	Puskesmas: 1 Pustu: 7 Poskesdes: 14	Puskesmas: 1 Pustu: 7 Poskesdes: 14	Dokter : 2 Perawat : 43 Bidan : 39	Dokter : 2 Perawat : 43 Bidan : 39
10	KELAM PERMAI	Puskesmas: 2 Pustu: 6 Poskesdes: 11	Puskesmas: 2 Pustu: 6 Poskesdes: 11	Dokter : 7 Perawat : 83 Bidan : 67	Dokter : 7 Perawat : 83 Bidan : 67
11	BINJAI HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 2 Poskesdes: 3	Puskesmas: 1 Pustu: 2 Poskesdes: 3	Dokter : 1 Perawat : 27 Bidan : 15	Dokter : 1 Perawat : 27 Bidan : 15
12	KETUNGAU HILIR	Puskesmas: 2 Pustu: 8 Poskesdes: 7	Puskesmas: 2 Pustu: 8 Poskesdes: 7	Dokter : 4 Perawat : 57 Bidan : 29	Dokter : 4 Perawat : 57 Bidan : 29
13	KETUNGAU TENGAH	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Puskesmas: 1 Pustu: 9 Poskesdes: 6	Dokter : 2 Perawat : 70 Bidan : 58	Dokter : 2 Perawat : 70 Bidan : 58
14	KETUNGAU HULU	Puskesmas: 1 Pustu: 10 Poskesdes: 8	Puskesmas: 1 Pustu: 10 Poskesdes: 8	Dokter : 1 Perawat : 45 Bidan : 21	Dokter : 1 Perawat : 45 Bidan : 21
	KABUPATEN	Puskesmas: 20 Pustu: 103 Poskesdes: 127	Puskesmas: 20 Pustu: 103 Poskesdes: 127	Dokter : 54 Perawat : 702 Bidan : 523	Dokter : 54 Perawat : 702 Bidan : 523

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Subbag Program, Informasi dan Humas 2022

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA SINTANG

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	-	-	-	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2022

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA SINTANG						
NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	-	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter, Bidan, Perawat	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650	-	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi : 39 Guru Paud: 20 Kader Kesehatan: 3063	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi : 39 Guru Paud: 20 Kader Kesehatan: 3063	-	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 470 Dokter/Dokter Gigi : 20 Perawat : 650 Ahli gizi: 39 Kemas: 29 Guru: 4210 Kader kesehatan: 3063	Bidan: 470 Perawat: 650 Ahli Gizi: 39 Kemas 29 Kader kes; 3063 Dokter gigi: 8 Guru: 2943	dokter gigi: 12 Guru: 1267	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi: 39 Kemas: 29 Non-Kes terlatih: 830	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi: 39 Kemas: 29 Tenaga Non-Kesehatan Terlatih: 75	Tenaga Non-Kesehatan Terlatih: 755	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan: 470 Dokter: 51 Perawat: 650 Non-Kesehatan Terlatih: 200	Bidan: 470 Dokter: 51 Perawat: 650 Tenaga Non-Kesehatan Terlatih: 100	Tenaga Non-Kesehatan Terlatih: 100	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Kemas: 29	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Kemas: 29	-	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masy yg terlatih	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi: 39 Kemas: 29	Bidan : 470 Dokter : 51 Perawat : 650 Ahli gizi: 39 Kemas: 29	-	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter, Perawat	Dokter/perawat terlatih jiwa/tenaga kesehatan lainnya: 20	Dokter/perawat terlatih jiwa/tenaga kesehatan lainnya: 20	-	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	dokter, perawat, ATLM, Analis, Kemas Tenaga Kesehatan/Non terlatih	Dokter: 51 Perawat: 650 ATLM: 23 Penata Rontgen: 1 Kemas: 29 Tenaga Non-kes terlatih: 21	Dokter: 51 Perawat: 650 ATLM: 23 Penata Rontgen: 1 Kemas: 29 Tenaga Non-kes terlatih: 21	-	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	dokter, perawat, ATLM, Analis, Kemas Tenaga Kesehatan/Non terlatih	Dokter: 51 Perawat: 650 Bidan: 470 ATLM: 23 Kemas: 29 Non-kes terlatih: 10	Dokter: 51 Perawat: 650 Bidan: 470 ATLM: 23 Kemas: 29 Non-kes terlatih: 10	-	

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan 2022

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : SINTANG

NO.	KODE *)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			UNIT KERJA PEBANGLAHT DAERAH PEVANGCING JAWAH 12
				TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1			Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
1	02		Urusan pemerintahan bidang kesehatan		393.484.238.266	403.321.364.723	413.404.398.841	423.739.508.812	434.332.996.532	434.332.996.532						Dinas Kesehatan		
1	02	01	1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	179.920.076.510	184.418.078.423	189.028.530.383	193.754.243.643	198.598.099.734	198.598.099.734						Dinas Kesehatan		
1	02	01	2 Program pemertihan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah pakcerms yang terselenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah pakcerms dikali 100. Standar nasional 20% dari jumlah seluruh pakcerms	190.036.301.256	194.787.208.787	199.656.889.007	204.548.311.232	209.764.519.013	209.764.519.013						Dinas Kesehatan		
1	02	01	3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis per-satuan penduduk	22.596.010.550	23.560.660.763	24.149.677.282	24.753.419.214							25.372.254.694	Dinas Kesehatan		
1	02	01	4 Program sedian farmasi, diet kesehatan, dan makanan minuman	Persentasi apok, toko obat ilegal, UMOOT dan opik yang berizin	168.701.000	172.918.525	177.241.488	181.672.525	186.214.338	186.214.338						Dinas Kesehatan		
1	02	01	5 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga aktif	373.168.000	382.498.225	392.060.881	401.862.198	411.908.753	411.908.753						Dinas Kesehatan		

Sumber: RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)		PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8716	7241	83,1%	1.837.174.300	1.652.252.198	89,9%	APBN/APBD	11
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8716	6658	76,4%	644.867.000	333.515.000	51,7%	APBN/APBD	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6891	6450	93,6%	346.053.000	333.570.654	96,4%	APBN/APBD	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	38254	25016	65,4%	87.165.000	86.783.000	99,6%	APBN/APBD	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	44138	7641	17,3%	608.426.500	512.215.600	84,2%	APBN/APBD	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137270	60417	44,0%	88.891.500	81.909.094	92,1%	APBN/APBD	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	36308	30157	83,1%	237.280.000	193.856.494	81,7%	APBN/APBD	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	72050	17706	24,6%	-	-	-	APBN/APBD	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	529	500	94,5%	-	-	-	APBN/APBD	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	645	600	93,0%	195.645.000	164.235.000	83,9%	APBN/APBD	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4903	1998	40,8%	66.852.500	66.852.500	100,0%	APBN/APBD	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	9884	4862	49,2%	44.840.000	44.840.000	100,0%	APBN/APBD	

Sumber: Data Penerima Layanan: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2022
Pendanaan: Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Subbag Keuangan dan Aset)

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

Dalam melaksanakan SPM kesehatan, sangat penting untuk melakukan pemetaan kondisi awal SPM kesehatan di Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Standar nasional untuk capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Berdasarkan pemetaan kondisi awal SPM kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, adapun target pencapaian SPM kesehatan di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

No	Capaian Kinerja	
	Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100 %

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA VARIABEL	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)				JUMLAH	%
			TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4		
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	1.837.174.300	-	323.172.500	510.442.200	818.637.498	1.652.252.198	89,93%
2	PELAYANAN KESEHATAN BERSALIN	644.867.000	-	95.220.000	138.085.000	100.210.000	333.515.000	51,72%
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	346.053.000	-	51.586.200	139.365.454	142.619.000	333.570.654	96,39%
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	87.165.000	-	1.940.000	39.858.000	44.985.000	86.783.000	99,56%
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	608.426.500	-	65.147.500	170.256.000	276.812.100	512.215.600	84,19%
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	88.891.500	-	11.207.800	10.065.694	60.635.600	81.909.094	92,15%
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	237.280.000	-	26.335.000	83.951.494	83.570.000	193.856.494	81,70%
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	0	-	-	-	-	-	-
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)	0	-	-	-	-	-	-
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	195.645.000	-	26.862.500	89.865.000	47.507.500	164.235.000	83,95%
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	66.852.500	33.610.000	33.242.500	-	-	66.852.500	100,00%
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFeksi VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	44.840.000	-	28.070.000	7.762.500	9.007.500	44.840.000	100,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Subbag Keuangan dan Aset)

D. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah tenaga kesehatan (Nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebanyak 1946 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Medis (Dokter & Dokter spesialis)	: 158 orang
2. Bidan	: 548 orang
3. Perawat/Perawat Gigi	: 962 orang
4. Farmasi	: 66 orang
5. Gizi	: 27 orang
6. Sanitasi	: 29 orang
7. Kesehatan Masyarakat	: 35 orang
8. Teknisi Medis, All	: 142 orang

Jumlah dukungan personil diatas diambil dari tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas dan Rumah sakit di lingkungan Kabupaten Sintang.

E. HASIL CAPAIAN/REALISASI

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja SPM
Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2022

No	Indikator	Jumlah yg harus terlayani 2022	Jumlah yg terlayani 2022	
			Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8716	7241	83,1%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8716	6658	76,4%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6891	6450	93,6%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	38254	25016	65,4%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44138	7641	17,3%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137270	60417	44,0%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36308	30157	83,1%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	72050	17706	24,6%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	529	500	94,5%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	645	600	93,0%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	4903	1998	40,8%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9884	4862	49,2%

Capaian SPM Kabupaten Sintang untuk indikator pelayanan kesehatan dasar belum memenuhi target (Nasional) yaitu 100 %. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target sehingga perlu dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan dasar mencapai target. Serta diperlukannya dukungan dan kerja sama sektor-sektor terkait untuk meningkatkan capaian SPM yang sesuai target.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. MASALAH

Indikator SPM yang tidak mencapai target (Nasional) antara lain, yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 83,1%, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 76,4%, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 93,6%, Pelayanan Kesehatan Balita 65,4%, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 17,3%, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44%, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 83,1%, Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi 24,6%, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 94,5%, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 93%, Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 40,8%, dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV 49,2%.

Penyebab capaian kinerja pelayanan kesehatan belum mencapai target, antara lain : kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan dasar (antenatal, bayi baru lahir, balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Lanjut, Usia Produktif, Penderita Hypertensi, Penderita ODGJ Berat, DM, HIV dan TB), akses ke fasyankes sulit, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas, mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota, kendala biaya, sosial budaya, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining.

2. SOLUSI

Pemetaan kondisi awal untuk penetapan target pencapaian sasaran pada tahun berjalan, penyebaran informasi mengenai pelayanan kesehatan dasar (antenatal, bayi baru lahir, balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Lanjut, Usia Produktif, Penderita Hypertensi, Penderita ODGJ Berat, DM, HIV dan TB).

Memaksimalkan program dan kegiatan yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan evaluasi untuk pemahaman definisi operasional (DO) serta melakukan peningkatan skrining ke sasaran. Pemanfaatan pendanaan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Laporan Kegiatan pelayanan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang beresiko tinggi yang dilayani jampersal
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia dasar	Sekolah yang dibina UKS dan kader kesehatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif
		Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Laporan kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Laporan kegiatan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Laporan pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV

BAB V

PENUTUP

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar kesehatan, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya pada OPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sintang Tahun 2022 ini disusun agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang diharapkan dapat terwujud.